



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 103 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada setiap satuan kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 69 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
4. Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB IV  
TUGAS, FUNGSI, KEPEGAWAIAN DAN  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 4

UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan Pusat Layanan Usaha Terpadu.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang Pusat Layanan Usaha Terpadu dan *techno park*;
- b. pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pengaturan fasilitas pendukung pusat layanan usaha terpadu dan *techno park*.
- c. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Kepegawaian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pejabat Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB V RINCIAN TUGAS UNIT DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala UPT

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu dalam pemberian bimbingan, konsultasi, pelatihan dan aplikasi/penerapan teknologi serta fasilitasi kegiatan promosi dan pemasaran komoditi serta *techno park*.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian dan pengawasan kegiatan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu;
  - b. pelaksanaan pengendalian dan pengaturan pusat layanan usaha terpadu dan *techno park*;
  - c. pelayanan informasi pusat layanan usaha terpadu dan *techno park* kepada masyarakat;
  - d. pemantauan operasional kegiatan pusat layanan usaha terpadu dan *techno park*;
  - e. penyediaan layanan konsultasi bisnis koperasi, usaha kecil dan menengah dalam hal masalah sumber daya manusia, potensi keunggulan dan komoditas daerah, manajemen usaha, kualitas produk, legalitas produk, kerja sama usaha dan pemanfaatan teknologi informasi.
  - f. pelaksanaan promosi produk-produk unggulan yang dapat dikunjungi oleh para pembeli atau pihak calon *buyer* lokal maupun luar negeri secara *online* maupun pameran di galeri UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu.
  - g. pelaksanaan pendampingan dan pelatihan bisnis dan teknis bagi calon wirausaha untuk pembuatan produk-produk tertentu dan pelatihan manajemen keahlian tertentu bagi wirausaha untuk mendukung pengembangan bisnis;
  - h. pembinaan personil, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan di lingkungan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu;
  - i. penyelenggaraan kesekretariatan pada UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu;
  - j. peengelolaan keuangan dan aset UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu;
  - k. penyusunan usulan rencana anggaran dan pendapatan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu;
  - l. penyusunan usulan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu;

- m. penyelenggaraan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu;
- n. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
  - a. menyusun rencana kerja UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu;
  - f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu;
  - g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
  - h. melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu;
  - i. melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu;
  - j. melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu;
  - k. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu;
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Kepala UPT secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPT harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPT, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 12

- (1) Pada UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pembiayaan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

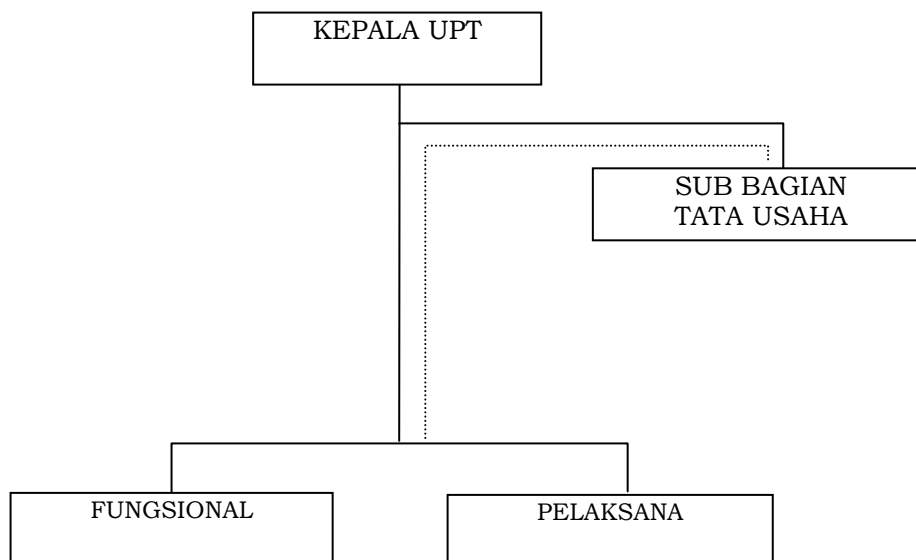
H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 103



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 103 TAHUN 2016  
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT  
LAYANAN USAHA TERPADU PADA DINAS KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM